

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGUATAN (SPMI) MELALUI PERENCANAAN DAN EVALUASI (RAKS)

Nur Fadhilah¹ Khairunnisa Azzahra² Nada Shofa Lubis³
Universitas Cendekia Abdiatama¹²³
nasutionnurfadhilah95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pelibatan komite sekolah dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), khususnya pada proses perencanaan dan evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekolah (RAKS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komite sekolah dalam penguatan SPMI pada tahap perencanaan dan evaluasi RAKS di TKIT Khoirul Wildan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah masih berada pada tingkat rendah. Komite tidak dilibatkan dalam penyusunan awal RAKS dan hanya berperan setelah dokumen selesai disusun. Pada tahap evaluasi, komite juga tidak terlibat dalam monitoring maupun penilaian capaian mutu, sehingga fungsi advisory dan controlling belum berjalan optimal dalam siklus PPEPP. Meskipun komunikasi sekolah dan komite berjalan baik serta kapasitas komite tergolong memadai, tidak adanya mekanisme formal pelibatan menjadi faktor utama terbatasnya kontribusi komite. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa penguatan kemitraan sekolah-komite melalui mekanisme partisipasi formal dalam SPMI menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan tata kelola mutu yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Komite Sekolah, SPMI, RAKS, PPEPP, Partisipasi Pendidikan

ABSTRACT

This study is motivated by the limited involvement of school committees in the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI), particularly in the planning and evaluation of the School Activity Action Plan (RAKS). The study aims to analyze the role of school committees in strengthening SPMI through the planning and evaluation stages of RAKS at TKIT Khoirul Wildan. A descriptive qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The findings reveal that the involvement of the school committee remains at a low level. The committee is not involved in the initial formulation of RAKS and only participates after the document has been finalized. In the evaluation stage, the committee is also not engaged in monitoring or assessing program outcomes, indicating that the advisory and controlling functions have not been optimally implemented within the PPEPP cycle. Although communication between the school and committee is good and the committee has adequate capacity, the absence of formal involvement mechanisms is the main limiting factor. The study concludes that strengthening school-committee partnerships through formal participation mechanisms in SPMI is essential to achieve more participatory, accountable, and sustainable quality management in schools.

Keywords: School Committee, Internal Quality Assurance System, RAKS, PPEPP, Educational Participation

PENDAHULUAN

Pada penelitian (Sukma and Pahrudin 2024) menyatakan bahwa mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah masih menghadapi berbagai tantangan,



terutama terkait konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Upaya peningkatan mutu menuntut adanya tata kelola yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, dalam (INSTITUSI n.d.) menyebutkan pemerintah menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari lima siklus inti, yaitu *penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu (PPEPP)*. Melalui mekanisme ini, sekolah diharapkan mampu membangun budaya mutu yang berkesinambungan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara strategis (NOR and SURIANSYAH 2024).

Sesuai dengan (Amirudin 2020) bahwa salah satu unsur penting dalam pelaksanaan SPMI adalah keberadaan komite sekolah sebagai mitra strategis. Berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2016, komite sekolah memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator antara sekolah, orang tua, serta masyarakat (Risdayanti n.d.). Dengan fungsi tersebut, (Wahyudi, Tualeka, and Pujileksono 2021) menjelaskan keberadaan komite diharapkan dapat memperkuat pengembangan mutu, khususnya melalui partisipasi dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekolah (RAKS), dokumen yang menjadi instrumen utama perencanaan program berbasis Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan RKAS.

Namun, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan konsep ideal tersebut. Komite sekolah pada satuan pendidikan yang diteliti hanya terlibat secara terbatas dalam perencanaan RAKS. Penyusunan program dan penentuan anggaran masih didominasi oleh kepala sekolah dan guru, sementara komite baru dilibatkan setelah dokumen selesai dirancang, terutama pada pembagian tugas kegiatan seperti makan sehat, *akhirussanah*, peringatan hari guru, atau kegiatan sosial lainnya. Minimnya pelibatan ini berdampak pada kecilnya kontribusi komite dalam proses penetapan prioritas mutu sekolah.

Selain itu, fungsi evaluasi yang seharusnya menjadi bagian penting dari siklus PPEPP juga belum berjalan optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa evaluasi bersama setelah pelaksanaan program hampir tidak pernah dilakukan, sehingga perbaikan mutu tidak didasarkan pada proses refleksi yang sistematis (Juano, Ntelok, and Jediut 2019). Komite lebih banyak menerima laporan informal melalui unggahan dokumentasi kegiatan daripada terlibat dalam monitoring langsung. Meskipun anggota komite memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan memahami dokumen seperti EDS dan RAKS, kemampuan ini belum dimanfaatkan secara optimal karena tidak ada mekanisme pelibatan formal.

Kondisi ini diperkuat oleh temuan penelitian terdahulu. (Herlina et al. 2024) di SMA Negeri 1 Jepun menunjukkan bahwa peran komite masih bersifat simbolis dan terbatas pada dukungan administratif, bukan pada pengambilan keputusan strategis. Minimnya pemahaman dan pelibatan menjadi hambatan utama. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan (Sman and Jihan 2025) di SMA Negeri 3 Ponorogo menunjukkan hasil berbeda, yaitu komite berperan aktif dalam fungsi pertimbangan, pendanaan, pengawasan, dan mediasi sehingga mampu mendorong peningkatan mutu sekolah. Perbandingan kedua hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas komite sangat ditentukan oleh pola kemitraan dan ruang partisipasi yang diberikan oleh sekolah.



Berdasarkan kajian tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian. Studi sebelumnya lebih menekankan aspek pendanaan dan dukungan administrative (Sman and Jihan 2025), sementara keterlibatan komite dalam SPMI khususnya peran strategis dalam penyusunan dan evaluasi RAKS masih jarang dikaji. Padahal, menurut (Siregar et al. 2025) RAKS merupakan instrumen penting yang menentukan prioritas mutu dalam satu tahun ajaran. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana komite berperan dalam penguatan SPMI melalui proses perencanaan dan evaluasi RAKS, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang bertujuan menggambarkan peran komite sekolah dalam perencanaan dan evaluasi RAKS pada pelaksanaan SPMI di TKIT Khoirul Wildan. Informan penelitian terdiri atas ketua komite, anggota komite, kepala sekolah, guru, serta operator SPMI yang dipilih melalui teknik purposive sampling karena dianggap memahami proses perencanaan dan mutu sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi seperti RAKS, EDS, RKAS, notulen rapat, berita acara, dan arsip kegiatan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ulfah and Subadi 2021). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan informasi antar-informan dan memverifikasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumen (Adaristi, Lestari, and Prasiani 2025). Alur penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, penarikan temuan, hingga penyusunan kesimpulan (Adaristi et al. 2025).

Komite Sekolah

Menurut (Sayuti 2022) komite sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan. Menurut Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dalam (Menteri n.d.), komite sekolah berfungsi memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk pertimbangan, pengawasan, maupun mediasi antara sekolah dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dalam (Hermawan 2016), komite sekolah memiliki empat fungsi utama:

1. Advisory Agency (Pemberi Pertimbangan), Komite sekolah memberikan masukan dan rekomendasi kepada sekolah terkait kebijakan dan program pendidikan, termasuk rencana anggaran, kurikulum, dan perencanaan mutu.
2. Supporting Agency (Pendukung), Komite dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun finansial, termasuk penggalangan dana non-wajib untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan.
3. Controlling Agency (Pengawasan), Komite melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program sekolah dan penggunaan anggaran agar berjalan transparan dan akuntabel.
4. Mediating Agency (Mediator), Komite menjadi penghubung antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pengembangan mutu satuan pendidikan.



SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)

Menurut (Nugroho and Miyono 2024) SPMI merupakan sistem penjaminan mutu yang dikembangkan pada satuan pendidikan untuk memastikan mutu pendidikan berkembang secara terencana, berkelanjutan, dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). (Sauri, Hidayat, and Rostini 2019) juga menegaskan SPMI berorientasi pada perbaikan mutu internal melalui siklus yang sistematis. Menurut Permendikbud No. 28 Tahun 2016 dan panduan dari Direktorat Jenderal Mutu Pendidikan (Pendidikan, Kebudayaan, and Indonesia 2016), SPMI berfungsi sebagai kerangka kerja yang menuntun sekolah melaksanakan peningkatan mutu secara mandiri.

dalam buku penjaminan mutu (Ramadana et al. 2022) Lima Siklus PPEPP dalam SPMI antara lain;

1. Penetapan Standar, Sekolah menetapkan indikator mutu yang ingin dicapai berdasarkan SNP dan hasil evaluasi diri.
2. Pelaksanaan, Sekolah menjalankan program-program peningkatan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi, Sekolah melakukan evaluasi untuk melihat ketercapaian standar dan efektivitas program.
4. Pengendalian, Sekolah melakukan tindak korektif apabila terdapat ketidaksesuaian antara target dan realisasi.
5. Peningkatan Mutu, Sekolah menetapkan langkah perbaikan untuk mencapai mutu yang lebih tinggi secara berkelanjutan.

Adapun Peran Pemangku Kepentingan dalam SPMI Menurut Direktorat Mutu Dikdasmen (2016) dalam (Ngabidin 2020) mengatakan keberhasilan SPMI dipengaruhi oleh kolaborasi: Kepala sekolah sebagai (penanggung jawab utama), Guru sebagai pelaksana inti (Pengawas sekolah sebagai pembina mutu), Komite sekolah sebagai mitra penguatan mutu (khususnya dalam perencanaan dan evaluasi program).

Rencana Aksi Kegiatan Sekolah (RAKS)

(Widiyawati and Sa'adah 2025) menyebutkan RAKS adalah dokumen rencana aksi program tahunan sekolah yang disusun berdasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) untuk mencapai target mutu melalui program-program yang terukur. RAKS menjadi tahapan operasional dari perencanaan mutu. Adapun Keterkaitan RAKS dengan EDS dan RKAS(Avicenna 2021);

1. EDS (Evaluasi Diri Sekolah) menjadi dasar penentuan masalah dan prioritas mutu.
2. RAKS merupakan rencana aksi untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam EDS.
3. RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) mengatur pembiayaan seluruh program, termasuk RAKS.

Dengan demikian, RAKS berfungsi sebagai alat utama perencanaan mutu dalam siklus SPMI. Menurut (Yunus, Rusli, and Pd n.d.) Direktorat Mutu Pendidikan (2019) , menurut (Durjani 2021) RAKS wajib:

- a. Memuat indikator kinerja,
- b. Jadwal kegiatan,
- c. Penanggung jawab,
- d. Sumber daya,
- e. Target capaian, serta



f. Mekanisme monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan teori komite sekolah, SPMI, dan RAKS, peran komite sebagai mitra strategis idealnya mencakup pemberian pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dalam peningkatan mutu (Sman and Jihan 2025). Dalam konteks SPMI, peran tersebut seharusnya tercermin pada pelibatan komite dalam perencanaan dan evaluasi program sekolah. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dengan praktik. Komite lebih banyak dilibatkan pada tahap pelaksanaan kegiatan, sedangkan perencanaan RAKS dan evaluasi program masih didominasi oleh pihak sekolah. Ketidakterlibatan ini berpotensi menghambat penguatan SPMI karena tidak semua pemangku kepentingan berkontribusi pada identifikasi masalah, penetapan prioritas mutu, dan evaluasi keberhasilan program.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Arnstein 1969 yang dikembangkan dalam penelitian (Puspita and Kahdar 2021) yang memperkenalkan *Ladder of Participation*, yang menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pada konteks komite sekolah (Ekawati, Haryati, and Wuryandini 2024) menegaskan bahwa idealnya komite berada pada tingkat: *Partnership* (Kemitraan) & *Delegated Power* (Pemberian Wewenang Terbatas) Namun pada banyak sekolah, posisi komite masih berada pada tingkat partisipasi simbolis. adapun keterkaitan komite sekolah dengan penguatan mutu. Berdasarkan teori di atas dan Permendikbud 75/2016 (Menteri n.d.), kontribusi komite terhadap mutu dilihat dari:

- a. Pelibatan dalam perencanaan mutu (RAKS) melalui masukan dan rekomendasi.
- b. Dukungan pelaksanaan mutu baik tenaga, moral, maupun sumber daya.
- c. Pengawasan program mutu, khususnya monitoring dan evaluasi.
- d. Menjadi penghubung agar transparansi dan akuntabilitas sekolah meningkat.

Dengan demikian, komite memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPMI dan pencapaian indikator mutu Pendidikan (Irnawati, et al. 2025) . Berdasarkan alur tersebut, penelitian ini memetakan hubungan antara:



GAMBAR 1.1 Kerangka Berfikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam diimplementasikan melalui tahapan rekrutmen, pelatihan, motivasi, dan evaluasi kinerja yang berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga



pendidik. Lembaga yang menerapkan manajemen SDM secara terstruktur cenderung menunjukkan kinerja organisasi yang lebih baik dibandingkan lembaga yang belum menerapkannya secara optimal.

Dalam konteks pengelolaan RAKS di TKIT Khoirul Wildan, penyusunan dokumen RAKS dilakukan sepenuhnya oleh kepala sekolah dan guru tanpa melibatkan komite pada tahap perencanaan awal. Komite baru dilibatkan setelah dokumen RAKS selesai disusun, yaitu dalam rapat awal tahun yang lebih berfokus pada penyampaian program dan pembagian tugas kegiatan sekolah seperti makan sehat, akhirussanah, hari guru, dan kegiatan sosial.

Pada tahap pelaksanaan, komite berperan sebagai pendukung kegiatan sekolah yang bersifat teknis. Komunikasi antara sekolah dan komite berlangsung melalui media WhatsApp serta rapat-rapat informatif yang bersifat satu arah, yaitu penyampaian informasi dari sekolah kepada komite. Dalam proses ini, komite tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis terkait pelaksanaan program.

Pada tahap evaluasi, komite tidak dilibatkan dalam proses monitoring maupun penilaian program. Evaluasi kegiatan dilakukan secara internal oleh pihak sekolah, sedangkan komite hanya menerima informasi hasil pelaksanaan melalui dokumentasi berupa foto, video, dan laporan singkat. Dengan demikian, tidak terdapat evaluasi formal yang melibatkan komite sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

Dalam konteks pengelolaan RAKS di TKIT Khoirul Wildan, penyusunan dilakukan oleh kepala sekolah dan guru tanpa keterlibatan komite pada tahap awal. Komite baru dilibatkan setelah dokumen selesai melalui rapat awal tahun, terutama untuk pembagian tugas kegiatan seperti makan sehat, akhirussanah, hari guru, dan kegiatan sosial. Pelibatan komite pada tahap perencanaan hanya berupa pembagian tugas untuk beberapa kegiatan seperti makan sehat, akhirussanah, hari guru, dan kegiatan sosial. Evaluasi bersama antara sekolah dan komite jarang dilakukan. Evaluasi kegiatan tidak dilaksanakan setelah setiap program selesai. Komite hanya mengetahui hasil kegiatan melalui laporan triwulan atau dokumentasi yang dibagikan guru. Evaluasi formal tidak dilaksanakan secara rutin. Komite membantu sekolah dalam berbagai kegiatan. Anggota komite memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana. Komunikasi antara guru dan komite berjalan lancar melalui WhatsApp. Pembagian tugas antara sekolah dan komite jelas sejak awal tahun ajaran. Tidak ditemukan hambatan yang mengganggu kerja sama antara sekolah dan komite. Evaluasi yang jarang dilakukan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan peran komite, namun tidak disebut sebagai hambatan oleh informan. Komite dilibatkan setelah perencanaan selesai. Keterlibatan komite terutama pada pelaksanaan kegiatan. Komite menerima informasi melalui rapat awal atau pesan dari guru. Pelibatan dalam keputusan strategis tidak dilakukan. Pengawasan dilakukan melalui dokumentasi kegiatan yang dibagikan oleh guru.

Peran Komite Sekolah Dalam Perencanaan (RAKS)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah dalam perencanaan Rencana Aksi Kegiatan Sekolah (RAKS) di TKIT Khoirul Wildan masih berada pada level pelibatan minimal. Komite tidak dilibatkan pada tahap penyusunan awal, termasuk identifikasi kebutuhan mutu, perumusan program, serta penyusunan anggaran. Dokumen RAKS sepenuhnya disusun oleh kepala sekolah dan guru, sementara komite baru



dilibatkan setelah dokumen selesai melalui rapat awal tahun yang berfokus pada penjelasan program dan pembagian tugas kegiatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi komite lebih bersifat pelaksana teknis kegiatan, bukan sebagai mitra strategis dalam perencanaan mutu. Jika dibandingkan dengan teori komite sekolah dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 (Menteri n.d.), peran komite idealnya mencakup empat fungsi utama:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*)
2. Pendukung (*supporting agency*)
3. Pengawas (*controlling agency*)
4. Mediator (*mediating agency*)

Dalam konteks RAKS, (Makmun 2014) juga menegaskan fungsi komite yang seharusnya menonjol adalah fungsi *advisory* dan *controlling*, karena penyusunan RAKS berkaitan langsung dengan perencanaan mutu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak berjalan optimal. Komite jarang memberikan pertimbangan strategis karena tidak terlibat dalam tahap penetapan prioritas mutu berbasis EDS. Mereka juga tidak melakukan telaah terhadap rancangan kegiatan sebelum disahkan sekolah, sehingga ruang kontribusinya terbatas pada dukungan teknis pelaksanaan program seperti kegiatan makan sehat, akhirussanah, hari guru, dan kegiatan sosial lainnya. Kondisi ini berbeda dengan konsep SPMI yang menempatkan komite sebagai mitra penguatan mutu, terutama pada tahap penetapan dan evaluasi standar mutu (Rohidin, Pd, and Saepudin 2025). Ketika komite tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan, maka peran komite dalam siklus PPEPP tidak dapat berjalan sesuai kerangka SPMI.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara teori ideal tentang peran komite sekolah dan praktik pelaksanaannya di TKIT Khoirul Wildan. temuan ini sejalan dengan penelitian Jepon dan Ponorogo. Ketidakterlibatan komite dalam perencanaan ini sejalan dengan hasil penelitian di SMA Negeri 1 Jepon yang menemukan bahwa peran komite cenderung bersifat simbolis dan terbatas pada dukungan administratif, sementara keputusan strategis tetap didominasi oleh sekolah (Herlina Ekawati et al. 2024). Penelitian Jepon juga menunjukkan bahwa komite sering kali tidak memahami mekanisme perencanaan mutu dan tidak diberi ruang untuk ikut mengambil keputusan penting. Sebaliknya, temuan penelitian SMA Negeri 3 Ponorogo menunjukkan kondisi yang kontras. Komite di Ponorogo berperan aktif dalam memberi pertimbangan terhadap kebijakan sekolah, menyetujui rencana anggaran, meninjau perencanaan mutu, dan melakukan pengawasan transparan terhadap pelaksanaan program. (Shalahuddin et al. 2025) menyatakan kontribusi komite di sekolah tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat praktik SPMI dan meningkatkan efektivitas program sekolah.

Dibandingkan dua penelitian tersebut, kondisi di TKIT Khoirul Wildan lebih mendekati pola Jepon, yaitu komite tidak diposisikan sebagai pengambil keputusan strategis. Pelibatan yang terbatas menyebabkan fungsi pertimbangan dan pengawasan tidak berkembang (Djasuli and Risqillah 2025). Menurut (Pramana and Munir 2025) posisi komite lebih sebagai pelaksana kegiatan non-akademik dibanding sebagai mitra strategis mutu pendidikan. Dari hasil penelitian, peneliti menganalisis beberapa factor yang menyebabkan minimnya peran komite dalam perencanaan RAKS



Tabel 1. Faktor Penyebab Minimnya Peran Komite Dalam Perencanaan RAKS

| No. | Faktor | Deskripsi Temuan Lapangan |
|-----|--|--|
| 1 | Pola kepemimpinan sekolah yang sentralistik | Proses penyusunan RAKS sepenuhnya dilakukan oleh kepala sekolah dan guru karena dianggap lebih memahami kebutuhan teknis. Komite tidak dilibatkan sejak tahap awal sehingga ruang partisipasinya tertutup. |
| 2 | Tidak adanya mekanisme pelibatan formal dalam SPMI | Sekolah tidak memiliki forum atau sistem yang melibatkan komite dalam perencanaan mutu. Komite hanya hadir pada rapat awal tahun setelah dokumen selesai disusun. |
| 3 | Komunikasi informatif, bukan kolaboratif | Informasi diberikan kepada komite dalam bentuk pemberitahuan keputusan, bukan diskusi perumusan kegiatan. Komite hanya mengetahui hasil akhir, bukan ikut menetapkan. |
| 4 | Pembagian tugas rutin tahunan | Komite diberikan tugas tetap seperti makan sehat, akhirussanah, dan hari guru. Pengulangan ini membuat peran komite terbatas pada fungsi teknis dan tidak berkembang ke arah peran strategis. |
| 5 | Persepsi bahwa komite sudah cukup berperan | Sekolah menganggap dukungan moral, dana, dan tenaga yang diberikan komite sudah memenuhi perannya sehingga tidak melihat perlunya pelibatan dalam perencanaan RAKS. |
| 6 | Evaluasi bersama jarang dilakukan | Tidak ada forum evaluasi rutin antara sekolah dan komite. Minimnya evaluasi menyebabkan komite tidak memiliki ruang untuk memberikan masukan terhadap perencanaan berikutnya. |

Peran komite sekolah dalam perencanaan RAKS di TKIT Khoirul Wildan masih belum sesuai dengan teori komite sekolah maupun kerangka SPMI. (Suryaman 2025) menyatakan pelibatan komite lebih bersifat teknis dan tidak menyentuh aspek strategis perencanaan mutu. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Japon yang menunjukkan lemahnya pelibatan komite, dan berbeda dengan temuan Ponorogo yang menunjukkan komite dapat berperan aktif jika diberi ruang dan mekanisme yang jelas. (Wambon et al. 2024) menyebutkan bahwa rendahnya pelibatan dipengaruhi pola kepemimpinan, budaya komunikasi, rutinitas pembagian tugas, dan absennya evaluasi formal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran komite dalam perencanaan RAKS di TKIT Khoirul Wildan masih berada pada kategori minimal. Komite tidak dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan sekolah, perumusan program, maupun penyusunan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa komite belum berfungsi sebagai mitra strategis dalam perencanaan mutu sekolah.



Secara normatif, berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2016, komite sekolah memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*), pendukung (*supporting*), pengawas (*controlling*), dan mediator (*mediating*). Dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), fungsi *advisory* dan *controlling* seharusnya berperan penting dalam tahap perencanaan dan evaluasi mutu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan optimal karena komite tidak dilibatkan dalam penetapan prioritas maupun penyusunan RAKS.

Hal ini menunjukkan bahwa peran komite belum berada pada level strategis, melainkan lebih banyak ditempatkan sebagai pelaksana kegiatan teknis yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa proses perencanaan RAKS masih bersifat sentralistik pada pihak sekolah. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini sejalan dengan penelitian di SMA Negeri 1 Jepon yang menunjukkan bahwa peran komite cenderung terbatas pada aspek administratif dan dukungan kegiatan sekolah. Namun demikian, kondisi ini berbeda dengan temuan di SMA Negeri 3 Ponorogo yang menunjukkan bahwa komite berperan aktif dalam memberikan pertimbangan, menyetujui rencana program, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mutu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas peran komite sangat dipengaruhi oleh mekanisme pelibatan yang dibangun oleh pihak sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya keterlibatan komite dalam perencanaan RAKS disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi dominasi pengambilan keputusan oleh kepala sekolah dan guru, tidak adanya mekanisme formal pelibatan komite dalam SPMI, pola komunikasi yang bersifat informatif satu arah, pembatasan peran komite pada kegiatan rutin tahunan, serta tidak adanya forum evaluasi yang melibatkan komite secara berkelanjutan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keterbatasan peran komite tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan sistem tata kelola dan budaya partisipasi di sekolah.

Peran Komite Sekolah Dalam Evaluasi (RAKS)

(Ekowati et al. 2025) menurut peran komite sekolah dalam evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekolah (RAKS) merupakan bagian penting dari siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tahap *evaluasi* dalam siklus PPEPP menuntut partisipasi pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah, untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program mutu telah mencapai target (Rohidin et al. 2025). Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di TKIT Khoirul Wildan, pelibatan komite dalam evaluasi belum berjalan sesuai konsep ideal yang diatur dalam SPMI (Nurmandi et al. 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring kegiatan oleh komite dilakukan secara tidak langsung. Komite menerima informasi melalui dokumentasi berupa foto, video, dan laporan ringkas yang dikirimkan oleh guru atau kepala sekolah. Monitoring lapangan secara langsung tidak dilakukan oleh komite, dan tidak terdapat jadwal khusus monitoring bersama antara sekolah dan komite.

Dalam dokumen sekolah, tidak ditemukan format monitoring atau daftar hadir rapat evaluasi yang melibatkan komite. Hal ini menunjukkan bahwa monitoring yang dilakukan bersifat informal dan hanya sebagai bentuk pelaporan, bukan bentuk kontrol mutu sebagaimana dijelaskan dalam fungsi *controlling agency*. Berdasarkan hasil wawancara, evaluasi program tidak dilaksanakan setelah setiap kegiatan. Evaluasi hanya



dilakukan secara internal oleh guru dan kepala sekolah. Komite tidak diundang secara khusus untuk melakukan evaluasi capaian mutu baik pada tingkat kegiatan maupun tahunan. Absennya evaluasi formal membuat komite tidak dapat memberikan umpan balik terhadap efektivitas program atau kesesuaian pelaksanaan dengan RAKS. Padahal menurut prinsip PPEPP, tahap evaluasi seharusnya dilakukan bersama pemangku kepentingan untuk menilai: ketercapaian indikator, kendala pelaksanaan, efektivitas anggaran dan keberlanjutan program (Ansori et al. 2025). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep evaluasi dalam SPMI dan praktik di sekolah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komite tidak memiliki ruang untuk memberikan rekomendasi formal terkait program mutu. Masukan hanya muncul secara lisan dan tidak terdokumentasi. Komite sebenarnya memiliki kemampuan untuk berkontribusi, mengingat sebagian besar anggotanya berlatar belakang pendidikan tinggi, namun mekanisme pemberian rekomendasi tidak disediakan oleh sekolah. Ketidakadaan mekanisme rekomendasi berdampak pada: minimnya refleksi mutu, tidak adanya catatan perbaikan tahun ke tahun dan tidak adanya tindak lanjut sistematis terhadap capaian RAKS (BARAT n.d.). Untuk memperjelas perbedaan antara konsep ideal SPMI (melalui PPEPP) dan praktik di lapangan, berikut ini tabel analisis kesenjangan antara teori dan temuan hasil penelitian.

Tabel 2. Kesenjangan Konsep dan Praktik Evaluasi RAKS

| Komponen Evaluasi (PPEPP) | Konsep Ideal dalam SPMI | Temuan Praktik di TKIT Khoirul Wildan |
|---------------------------------|--|--|
| Monitoring Pelaksanaan Kegiatan | Dilakukan secara sistematis, terjadwal, melibatkan komite sebagai bagian controlling agency (Nurlita 2022). | Komite hanya menerima laporan melalui foto atau pesan WhatsApp. Tidak ada monitoring langsung. |
| Evaluasi Capaian Program | Evaluasi dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan dan pada akhir tahun, melibatkan semua pemangku kepentingan (Lestari 2023). | Evaluasi hanya dilakukan internal oleh guru dan kepala sekolah. Komite tidak diundang. |
| Evaluasi Dokumen RAKS | Komite meninjau ulang kesesuaian pelaksanaan dengan RAKS serta memberikan umpan balik (Fitriah 2024). | Tidak ada telaah dokumen oleh komite. Komite hanya menerima RAKS dalam bentuk final. |
| Rekomendasi Perbaikan | Komite memberikan rekomendasi tertulis sebagai dasar peningkatan mutu tahun berikutnya (Ismail 2024). | Rekomendasi tidak pernah diminta secara formal. Masukan hanya bersifat lisan. |
| Dokumentasi Evaluasi | Notulen, daftar hadir, instrumen evaluasi, dan laporan direkap dan digunakan untuk peningkatan mutu. | Tidak ditemukan dokumen evaluasi bersama antara sekolah dan komite. |



Tabel 3. Faktor Penyebab Minimnya Evaluasi RAKS Bersama Komite

| No. | Faktor | Deskripsi Temuan |
|-----|--|---|
| 1 | Evaluasi tidak menjadi agenda rutin sekolah | Sekolah tidak menetapkan jadwal khusus evaluasi setelah kegiatan atau akhir tahun sehingga tidak ada forum evaluasi yang mengundang komite. |
| 2 | Evaluasi dianggap cukup dilakukan internal | Kepala sekolah dan guru melakukan evaluasi sendiri sehingga komite tidak dianggap memiliki peran mendesak dalam proses tersebut. |
| 3 | Komunikasi bersifat informatif | Komite hanya menerima laporan hasil kegiatan melalui pesan atau dokumentasi tanpa dilibatkan dalam diskusi refleksi mutu. |
| 4 | Tidak ada mekanisme evaluasi formal dalam SPMI sekolah | Sekolah tidak memiliki jadwal evaluasi PPEPP secara bersama, sehingga komite tidak memperoleh ruang dalam tahapan penilaian mutu. |
| 5 | Dominasi kepala sekolah dan guru | Pengambilan keputusan evaluasi dipusatkan pada pihak sekolah sehingga partisipasi komite menjadi sangat terbatas. |

Peran komite sekolah dalam evaluasi RAKS masih belum berjalan sesuai dengan konsep evaluasi dalam PPEPP. Komite tidak dilibatkan dalam monitoring, penilaian capaian mutu, maupun pemberian rekomendasi. Pelibatan terbatas hanya pada penerimaan informasi pascakegiatan. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara konsep ideal SPMI dan praktik di lapangan, serta menjadi salah satu faktor menghambat penguatan mutu sekolah secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite tidak terlibat dalam proses monitoring maupun evaluasi RAKS. Monitoring kegiatan tidak dilakukan secara langsung oleh komite, melainkan hanya melalui informasi tidak langsung yang diberikan oleh pihak sekolah dalam bentuk dokumentasi kegiatan. Evaluasi program juga dilakukan sepenuhnya secara internal oleh guru dan kepala sekolah tanpa melibatkan komite. Komite tidak dilibatkan dalam penilaian capaian mutu, tidak melakukan telaah terhadap pelaksanaan RAKS, serta tidak berpartisipasi dalam penyusunan rekomendasi perbaikan program.

Dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), evaluasi seharusnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,



termasuk komite sekolah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi controlling komite belum berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, tidak terdapat mekanisme umpan balik formal dari komite yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan program pada tahun berikutnya. Evaluasi yang dilakukan belum menghasilkan dokumentasi reflektif yang dapat mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

A. Faktor Pendukung

Kemitraan sekolah atau komite dalam penguatan SPMI dan penyusunan serta evaluasi RAKS tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang selaras dengan teori partisipasi masyarakat (Jihan n.d.). Menurut teori partisipasi Arnstein dalam (Ladung, Hardiansa, and Harun 2025), tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat apabila terdapat kapasitas individu, komunikasi yang baik, dan dukungan lingkungan sosial. Temuan lapangan menunjukkan beberapa faktor pendukung berikut:

1. Pengetahuan dan Kapasitas Komite

Salah satu faktor pendukung utama adalah latar belakang pendidikan komite yang sebagian besar merupakan lulusan sarjana dan memiliki pengalaman profesional yang relevan, termasuk guru, pegawai kantor, serta tenaga akuntansi. Kapasitas ini membuat komite:

- a) mudah memahami konsep dasar SPMI, RAKS, dan EDS
- b) mampu mengikuti diskusi perencanaan
- c) berpotensi memberi pertimbangan yang substansial

Dalam teori partisipasi masyarakat, tingginya kapasitas dan literasi komite menjadi modal sosial (*social capital*) yang memungkinkan kontribusi lebih bermakna (Januraga and Ked 2024). Faktor ini juga terlihat pada penelitian Ponorogo, di mana kapasitas komite yang kuat berkorelasi dengan partisipasi yang lebih strategis dalam perencanaan dan evaluasi mutu sekolah.

2. Komunikasi yang Baik antara Sekolah dan Komite

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa komunikasi sekolah-komite berlangsung lancar, terutama melalui WhatsApp dan pertemuan informal. Komunikasi yang responsif ini memudahkan:

- a) koordinasi pelaksanaan kegiatan,
- b) penyampaian kebutuhan teknis, dan
- c) penyesuaian pembinaan siswa antara sekolah dan rumah.

Dalam teori partisipasi, pola komunikasi yang terbuka dan dua arah memperkuat *collaborative partnership* (Zahria 2024). Hal ini menjadi fondasi kemitraan yang sehat, meskipun belum naik ke tingkat partisipasi strategis karena komite belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan RAKS.

3. Dukungan Orang Tua sebagai Bagian dari Komite

Dukungan orang tua menjadi faktor pendukung penting, terutama dalam kegiatan pelaksanaan program mutu seperti makan sehat, Khairussanah, parenting, dan kegiatan sosial. Mereka bersedia memberikan: a) tenaga, b) waktu, dan c) dukungan finansial bila sekolah menyampaikan kebutuhan secara terbuka. Teori partisipasi mencatat bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa dukungan moral, tenaga, maupun dana. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ponorogo, di mana dukungan orang tua menjadi



modal utama komite untuk menjalankan fungsi support system sekolah. Rendahnya keterlibatan komite dalam evaluasi RAKS dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu evaluasi yang tidak menjadi agenda rutin sekolah, pandangan bahwa evaluasi merupakan kewenangan internal sekolah, pola komunikasi yang bersifat pelaporan satu arah, tidak adanya mekanisme formal PPEPP yang melibatkan komite, serta dominasi sekolah dalam proses pengambilan keputusan evaluatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa siklus PPEPP belum berjalan secara utuh, khususnya pada tahap evaluasi partisipatif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi sekolah dalam pengelolaan SPMI menyebabkan peran komite terbatas pada aspek teknis dan tidak berkembang ke arah peran strategis. Hal ini berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses penjaminan mutu sekolah. Secara praktis, sekolah perlu mengembangkan mekanisme pelibatan komite yang lebih terstruktur sejak tahap perencanaan hingga evaluasi RAKS. Selain itu, perlu dibentuk forum evaluasi rutin yang melibatkan komite serta sistem dokumentasi rekomendasi sebagai bagian dari siklus PPEPP untuk mendukung peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah dalam pengelolaan RAKS di TKIT Khoirul Wildan masih belum optimal. Komite tidak dilibatkan dalam perencanaan awal dan hanya berperan pada tahap pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis. Pada tahap evaluasi, komite juga tidak dilibatkan dalam proses monitoring maupun penilaian program sehingga fungsi advisory dan controlling belum berjalan sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dan siklus PPEPP dalam SPMI. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara konsep ideal peran komite sekolah dan praktik pelaksanaannya di lapangan, yang ditandai oleh dominasi pihak sekolah dalam pengambilan keputusan dan terbatasnya mekanisme kolaborasi dengan komite. Selanjutnya, diperlukan pengembangan model kemitraan sekolah-komite yang lebih terstruktur dalam SPMI serta instrumen evaluasi kolaboratif berbasis PPEPP untuk meningkatkan efektivitas pelibatan komite dalam penjaminan mutu sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adaristi, N. L. P. N., Lestari, P. A., & Prasiani, N. K. (2025). Implementasi strategi influencer marketing, pemasaran digital, dan kepercayaan konsumen dalam peningkatan penjualan produk MS Cosmetic pada PT Urban Beauty. *E-Jurnal Manajemen*, 14(10), 799–813.
- Amirudin, M. F. (2020). Rekonstruksi pengelolaan komite sekolah sebagai mitra dalam peningkatan mutu sekolah. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 1–15.
- Ansori, A., Jamel, A. Z., Susiani, A., & Aryanti, I. (2025). Model evaluasi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah. *Al-Basyir: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(4), 29–38.
- Avicenna, A. (2021). *Supervisi pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- BARAT, S. P. P. N. (n.d.). *Pedoman audit mutu internal 2021*.
- Djasuli, M., & Risqillah, M. W. (2025). Auditor sebagai aktor kunci dalam penguatan fungsi pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bangkalan. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 6(1), 174–186.



- Durjani, A. (2021). *Modul kepala sekolah pembelajar RKJM dan RKAS*.
- Ekawati, H., Haryati, T., & Wuryandini, E. (2024). Peran komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 4(4), 278–289.
- Ekowati, M. A. S., Dananti, S. E. K., Fajriyah, N., Huda, S. E. M., Priskusanti, R. D., Suprayitno, S., Nurhidayanti, N., Siswanto, B. N., Akbar, Y. K., & SE, M. M. (2025). *Sistem penjaminan mutu internal*. PT Kimhsafi Alung Cipta.
- Fitriah, S. (2024). Analisis pelaksanaan manajemen kendali mutu (quality control) pada madrasah binaan di Kementerian Agama Kabupaten Buol.
- Hermawan, A. (2016). Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin.
- Irnawati, D., Haryati, T., & Wuryandini, E. (2025). Implementasi SPMI dalam meningkatkan mutu sekolah di MAN 2 Rembang. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 449–457.
- Ismail, B. (2024). Peran komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1(2), 118–132.
- Januraga, P. P. (2024). *Modal sosial dalam meningkatkan kesehatan masyarakat: Pendekatan teoritis dan empiris*. Baswara Press.
- Jihan, T. F. (n.d.). Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 3 Ponorogo.
- Juano, A., Ntelok, Z. R. E., & Jediut, M. (2019). Lesson study sebagai inovasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. *Randang Tana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 126–136.
- Ladung, F., Hardiansa, Y., & Harun, H. (2025). Peran dukungan pemerintah desa terhadap hubungan karakteristik individu dan partisipasi masyarakat desa. *Cateris Paribus Journal*, 5(2), 120–126.
- Lestari, A. (2023). Manajemen evaluasi model countenance Stake pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Lempuing OKI. *UNISAN Jurnal*, 2(1), 709–714.
- Makmun, M. K. (2014). Peran komite sekolah dalam peningkatan manajemen mutu pendidikan. *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*. <https://peraturan.go.id/id/permendikbud-no-75-tahun-2016>
- Ngabidin, M. (2020). *Budaya mutu wujudkan sekolah unggul: Kumpulan praktik baik implementasi sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan*. Penerbit Andi.
- Nor, T., & Suriansyah, A. (2024). Kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 4(4), 256–268.
- Nugroho, P., & Miyono, N. (2024). Dampak strategi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal terhadap kualitas pendidikan di SMK Negeri Bansari. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 5(2), 391–398.
- Nurlita, H. (2022). Peran controlling agency komite sekolah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di SMP Negeri 33 Makassar.



- Nurmandi, A., et al. (2019). *Pedoman SPMI PTMA*. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- Pramana, A., & Munir, M. (2025). Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDN 02 Negara Aji Tua Lampung Tengah. *Al-Mahabbah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 115–124.
- Puspita, E. A., & Kahdar, K. (2021). Studi komparasi partisipasi dalam proses perancangan material terbaru. *Jurnal Rupa*, 6(2), 99–111.
- Ramadana, A. P., Wardani, E. S. K. K., & Shaddiq, S. (2022). *Buku penjaminan mutu pendidikan*.
- Risdayanti, S., & Basri, S. (n.d.). Optimalisasi peran komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto.
- Rohidin, S. P. I., & Saepudin, M. P. (2025). *Manajemen mutu pendidikan*. Greenbook Publisher.
- Sauri, R. S., Hidayat, A. N., & Rostini, D. (2019). Sistem penjaminan mutu internal dalam peningkatan mutu hasil pendidikan di Universitas Islam Nusantara Bandung. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(2), 131–144.
- Sayuti, A. (2022). Peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Mubtadiin*, 8(1).
- Shalahuddin, M., et al. (2025). Analisis implementasi SPMI dan SPME di SMA. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(2), 2721–2736.
- Siregar, R. J., Sigalingging, S. A. P., Saragih, M. D., & Tamba, M. S. (2025). Analisis penyusunan RKAS dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan. *Journal Central Publisher*, 3(6), 3743–3751.
- Sukma, H. S., & Pahrudin, A. (2024). Manajemen mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. *JMPIS*, 5(3).
- Suryaman, M. (2025). Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Penelitian Tarbawi*, 10(1), 121–132.
- Ulfah, H., & Subadi, W. (2021). Peran kepala desa sebagai motivator dalam meningkatkan disiplin aparatur desa. *JAPB*, 4(2), 1361–1374.
- Wahyudi, K., Tualeka, B. A., & Pujileksono, S. (2021). Implementasi Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 109–125.
- Wambon, D., Medyati, N., Makaba, S., Irab, S. P., Ruru, Y., & Tingginehe, R. M. (2024). Analisis peran kepemimpinan kepala dinas terhadap kinerja pegawai. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 6695–6706.
- Widiyawati, T. E., & Sa'adah, N. (2025). Perencanaan berbasis data melalui rapor pendidikan dalam penyusunan RKAS. *JANACITTA*, 8(1), 22–26.
- Yunus, R., & Rusli, R. (n.d.). *Sistem penjaminan mutu pendidikan: Pengertian, lembaga, sistem, proses*. Penerbit Adab.
- Zahria, I. (2024). Komunikasi partisipatif kepala sekolah dalam mengembangkan kolaborasi dengan komunitas dan stakeholder. *Communicator: Journal of Communication*, 1(1).

